

DOI:10.36232/fair.v5i2.3955

Article History:

Received: 2025-08-25

Revised: 2025-09-16

Accepted: 2025-12-30

**FAIR : FINANCIAL & ACCOUNTING  
INDONESIAN RESEARCH**

Vol 5, Issue 2 (2025), 63-76

## **Pengaruh Penerapan SAP, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi SDM, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Yulianti<sup>1\*</sup>, dan Muhamad Rifandi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas  
'Aisyiyah Yogyakarta, DI.Yogyakarta, 55292, Indonesia

---

### **Abstract.**

*Financial reporting in the government system is crucial to improve its quality. Several factors influence the quality of financial reports. This study aims to examine the effect of the implementation of Government Accounting Standards (SAP), the Regional Financial Accounting System (SAKD), human resource competency (HR), and the use of information technology on the quality of financial reports of the Banggai Laut Regency Government. The research method used is a quantitative approach by distributing questionnaires to 81 respondents from 27 SKPD, and the data analyzed using multiple linear regression. The results show that the implementation of SAP, human resource competency, and the use of information technology have a positive and significant effect on the quality of financial reports. In contrast, the regional financial accounting system (SAKD) does not have a significant effect on the quality of financial reports. These findings contribute to expanding the study of public sector accounting by enriching the four variables tested in an integrated manner. These findings provide practical impacts for the Banggai Laut Regency government regarding the importance of implementing accounting standards and information technology in realizing reliable and accountable financial reports. This study still has limitations, namely in the geographical scope of Banggai Laut Regency, so the results of the study cannot be generalized to other regions. The research was also limited to quantitative methods, thus limiting our understanding of the phenomena. Future researchers can implement a mixed methods approach and expand the study to include government agencies in other regions to gain a more comprehensive understanding.*

**Keywords.** SAP; SAKD; HR Competence; Information Technology; Financial Report Quality

---

Corresponding Author: muhamadrifandi@unisayogya.ac.id, (author#2)

## PENDAHULUAN

Sistem administrasi pemerintahan daerah telah berubah didesentralisasi sejak pemerintah menetapkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang tercantum dalam UU No 25 tahun 1999. Ini memberikan daerah otonomi untuk mengelola kepentingan masyarakat dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan undang-undang. Salah satu syarat untuk pemerintahan yang demokratis dan kredibel adalah akuntabilitas laporan keuangan. Laporan keuangan perlu disusun secara akuntabel sehingga dalam sistem pemerintahan diadopsi suatu standar yang disebut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar Akuntansi Pemerintah adalah indikator yang mampu menunjukkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pemda berkualitas tinggi jika sumber informasi akuntansi terbuka dan dapat diakses, memenuhi standar yang dapat dipahami dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam hal ini, terdapat berbagai faktor yang mampu mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan seperti dalam pemerintahan daerah yang menerapkan SAP, SAKD, dan upaya meningkatkan kompetensi SDM. Penerapan SAP, Standar Akuntansi Keuangan Daerah dan kompetensi SDM memberi pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pujanira & Taman, 2017).

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, implementasi SAP adalah dasar akuntansi upaya menyusun laporan keuangan pemerintah. SAP berarti protokol akuntansi yang harus digunakan oleh semua lembaga pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan. Adanya SAP ini diketahui mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan. Dalam penelitian Hida et al. (2024) terbukti bahwa SAP memberikan pengaruh signifikan pada laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Derah Kota Bandung. Selain itu, terdapat juga Standar Akuntansi Keuangan Daerah yang dijadikan dasar dalam pengelolaan keuangan di tingkat daerah. SAKD merupakan sistem yang dimaksudkan untuk mengelola keuangan daerah. Standar Akuntansi Keuangan Daerah mengawasi seluruh proses keuangan daerah, mulai dari perencanaan, Penatausahaan, hingga pelaporan. Disebutkan bahwa dalam menciptakan tata keuangan daerah secara baik wajib menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Daerah diikuti kompetensi SDM. Teori ini bertentangan dengan penelitian Animah et al (2020) yang membuktikan jika "implementasi SAKD dan kompetensi SDM tidak memberi pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemda".

Dalam pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan dan atribut individu seperti pada konteks pegawai pemerintah, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan untuk menjalankan tanggung jawabnya secara profesional, efektif, dan efisien. Kompetensi SDM juga berarti kecakapan, wawasan maupun sikap yang dimiliki pegawai ketika menjalankan tugas. Setiap SKPD wajib mempunyai SDB berkompeten dimana mempunyai pemahaman akuntansi, mengenyam pendidikan dan pelatihan, dan berpengalaman untuk mengelola keuangan pemerintah daerah sehingga mampu mengimplementasikan sistem akuntansi terkait. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Evicahyani & Setiawina, (2016) kapasitas SDM mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kemampuan SDM secara lebih baik akan mempengaruhi hasil kualitas laporan keuangan. Dengan SDM yang berpengalaman dalam bidang akuntansi dan keuangan pemerintah akan mampu membuat laporan keuangan yang baik.

Faktor lain yang berpengaruh pada kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Adanya perkembangan teknologi informasi bukan menjadi suatu kebutuhan bukan lagi tuntutan untuk perusahaan ataupun lembaga. Suatu organisasi saat ini harus beradaptasi sehingga memerlukan teknologi informasi sebagai sarana mencapai tujuan. Terdapatnya teknologi informasi yang semakin maju bisa memberikan manfaat untuk organisasi maupun lembaga dalam rangka menunjang kinerja dengan komprehensif sehingga terdapat peluang tinggi bagi perusahaan mencapai produktivitas kerja dengan tepat, cepat, dan benar (Sasmita et al., 2020). Pemanfaatan teknologi informasi diketahui sangat mempermudah upaya menyusun laporan keuangan sehingga menunjang kualitas laporan keuangan. Menurut temuan Damayanti et al. (2024) terbukti bahwa pemanfaatan teknologi informasi akuntansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di OPD.

Pemerintah Kabupaten Banggai Laut berkomitmen dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah. Perluasan Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) dan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Penerapan SAKD dan SAP diharapkan mampu menunjang kualitas laporan keuangan daerah, agar informasi keuangan dari hasil praktik akuntansi menjadi lebih andal dan akuntabel. Kabupaten Banggai laut merupakan kabupaten di Daerah Sulawesi Tengah. Kabupaten Banggai laut secara administratif terdiri dari 7 kecamatan, 3 kelurahan dan 63 desa. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, menyatakan jika” Pemerintah Kabupaten Banggai Laut kembali menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2023 untuk yang ke-7 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi tengah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak ada masalah yang terjadi. BPK menemukan beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah yang wajib di tindak lanjuti. (bpk.go.id), antara lain Terdapat kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas, Terdapat pengeluaran kas dari Rekening Kas Daerah menggunakan dokumen SP2D tahun 2020 yang telah dibatalkan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah belum memadai. “

Dari sejumlah penelitian terdahulu, mengungkap bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan seperti SAP, SAKD, kompetensi SDM, maupun penggunaan teknologi informasi. Penelitian Yanti et al. (2020) menunjukkan jika penerapan SAP memiliki berdampak positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini mempertegas urgensi diterapkannya SAP untuk menyusun laporan keuangan pemerintah. Ketika terdapat ketaatan SDM pada SAP, maka semakin baik kualitas laporan keuangannya. Menurut Inapty & Martiningsih (2016) penerapan SAP diduga kuat berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah namun hasil temuan tidak menunjukkan hal serupa. Pada penelitian yang dilakukan faktor SAP diketahui tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Risnanto et al (2023) menunjukkan bahwa, “penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Brebes. Dengan kata lain, penerapan SAKD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.”

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Animah et al (2020) menunjukkan bahwa, “kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan”. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sasmita et

al (2020) mengungkapkan bahwa, “kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah di OPD Kabupaten Rokan Hilir. Semakin baik kompetensi SDM, maka kualitas laporan keuangannya juga akan semakin baik.” Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Amahala (2023) mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Oleh karena masih adanya perbedaan-perbedaan dan inkonsistensi hasil penelitian dari beberapa temuan diatas, maka penulis tertarik untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengkaji secara terpisah masing-masing variabel, atau hanya terbatas pada tiga faktor saja yaitu SAP, SAKD, dan kompetensi SDM, dalam penelitian ini mengkaji empat variabel secara sekaligus. Keterbaruan dari penelitian ini adalah dengan menambahkan 1 variabel yaitu Pemanfaatan teknologi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bertujuan mengkaji beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Adapun judul yang diangkat yaitu “Pengaruh Penerapan SAP, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kompetensi SDM dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi kasus Kabupaten Banggai Laut”. Hasil temuan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperluas teori dan wawasan mengenai akuntansi sektor public khususnya di tingkat pemerintahan daerah. Hasil temuan juga menjadi implikasi praktis bagi pemerintah daerah setempat dalam meningkatkan laporan keuangan daerah melalui faktor yang terbukti dapat mempengaruhi. Dengan demikian, hasil temuan bisa dijadikan acuan dan dasar merumuskan kebijakan dalam mengelola keuangan daerah yang lebih akuntabel.

## **LITERATURE REVIEW**

### **Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis Pengaruh SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai landasan hukum untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran dana dan realisasi yang dilakukan dengan transparan, bersih, efektif, dan bisa diandalkan. Tujuannya yakni dapat disusun laporan keuangan dengan menunjang transparansi juga akuntabilitas dimana disesuaikan terhadap standar aturan yang ditetapkan untuk memastikan kualitas laporan keuangan yang tinggi. Basis akuntansi SAP menggunakan basis akrual sejak PP Nomor 71 Tahun 2010 dirilis. Menurut Rompas & Kindangen (2022), untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, acuan standar akuntansi diperlukan. Acuan ini dapat mencakup konsistensi atau kesesuaian data, kemampuan untuk membandingkan data untuk tahun yang akan datang, keterbukaan isi informasi, relevansi, dan keandalan laporan keuangan.

Jika SAP digunakan dengan benar, laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih baik. Hubungan SAP dan Teori keagenan menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat menyebabkan asimetri informasi, yang berpotensi memicu manajemen laba oleh agen. Dengan SAP, diharapkan informasi keuangan yang disajikan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memperkecil kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh agen. Adanya SAP ini diketahui mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan. Dalam penelitian Hida et al.

(2024) terbukti bahwa SAP memberikan pengaruh signifikan pada laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung. Penelitian Risnanto et al. (2023) dan Utama (2021) menyatakan jika secara parsial hanya SAP yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian dari Yanti et al (2020) menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berdampak positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan Faturey (2021), yang menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berdampak positif dan signifikan.

**H<sub>1</sub>:** *“Penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan”*

#### **Pengaruh SAKD terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah suatu proses dari upaya mengumpulkan data hingga pelaporan keuangan yang mengatur pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (APBD), yang dapat dilakukan manual maupun melalui aplikasi komputer (Permendagri No.59 Tahun 2007). Karena laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah akan digunakan menjadi dasar dalam mengambil keputusan, informasi di dalamnya harus memberi manfaat untuk pengguna. Disebutkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, menjadikan menjadi catetan dan laporan lebih akurat, tepat, dan komprehensif, sehingga laporan keuangan akan menjadi lebih baik.

Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan kualitas laporan keuangan dalam konteks teori keagenan, di mana hubungan antara prinsipal dan agen diatur melalui informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Teori keagenan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas untuk mengurangi konflik kepentingan, sehingga sistem akuntansi yang efektif dapat memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya. Dengan demikian, sistem akuntansi yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, tetapi juga memperkuat hubungan antara prinsipal dan agen dengan memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Hasil penelitian Binawati & Nindyaningsih (2022) menyatakan jika secara parsial sistem akuntansi keuangan daerah memberi pengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan yang terbukti melalui uji parsial. Penelitian Vidyasari & Suryono (2021) juga menegaskan bahwa SAKD berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.

**H<sub>2</sub>:** *“Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan”*

#### **Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Dalam sebuah organisasi (entitas) pemerintah, sumber daya manusia sangat penting. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau organisasi untuk menyelesaikan tugas dan upaya untuk mencapai tujuannya dengan cara yang efisien dan efektif. Kualitas sumber daya manusia mencakup kualitas fisik dan non-fisik, seperti kemampuan bekerja, kemampuan berpikir, dan keterampilan. Kaitan antara kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan bisa dijelaskan oleh Teori Keagenan. Teori tersebut menerangkan bahwa pemerintah daerah yang merupakan agen wajib memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai principal. Sumber daya manusia dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan yang baik sesuai pada tujuan organisasi sektor publik. Pemerintah Daerah sebagai agen memerlukan sumber daya manusia yang ahli pada bidangnya guna

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan elemen yang sangat penting yang bisa memberi kontribusi optimal dalam rangka mencapai tujuan. Semakin baik kompetensi sumber daya manusia dalam setiap pegawai keuangan di SKPD bagian keuangan yang bekerja maka mampu menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi karakteristik kualitatif hanya jika penyusunannya dilakukan oleh staf yang kompeten. Jika staf yang ada tidak kompeten, ini akan berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Iqbal et al., 2022). Hasil temuan Binawati & Nindyaningsih (2022) membuktikan jika kompetensi sumber daya manusia mampu mempengaruhi secara signifikan pada kualitas akuntansi keuangan seperti laporan keuangan daerah yang terbukti melalui uji parsial atau uji t.

**H<sub>3</sub>: “Kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan”**

### **Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Pengguna laporan keuangan menerima berbagai informasi keuangan melalui teknologi informasi. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 mengenai sistem informasi keuangan daerah mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan dan memanfaatkan teknologi informasi yang lebih canggih untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam pengelolaan keuangan daerah dan menyediakan layanan publik dengan informasi tentang keuangan daerah. Dengan penggunaan dan kemajuan teknologi informasi, banyak pihak berharap dapat mendapatkan informasi keuangan daerah dengan cepat.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat mendorong pekerja untuk menjalankan tanggung jawabnya untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pelanggan karena pekerja dapat menggunakan teknologi informasi dengan cepat dan tepat untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas. Hasil temuan Binawati & Nindyaningsih (2022) membuktikan jika pemanfaatan teknologi informasi daya manusia mampu mempengaruhi secara signifikan pada kualitas akuntansi keuangan seperti laporan keuangan daerah yang terbukti melalui uji parsial atau uji t. Penelitian lain Purnama (2020) dan Ternalemata et al (2021) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

**H<sub>4</sub>: “Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan”**

### **METODE, DATA DAN ANALISIS**

Penelitian ini mengadopsi penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu metode dengan dilandasi filsafat positivisme dalam suatu sampel ataupun populasi untuk mengkaji fenomena secara terukur, konkrit, dan hubungan sebab akibat (Ghozali, 2017). Fokus penelitian adalah pejabat struktural atau pengelola unit kerja pada setiap SKPD yang ada di Kabupaten Banggai Laut, Jumlah SKPD di kabupaten Banggai Laut sebanyak 34 SKPD, yang terdiri dari 29 kedinasan dan 5 non kedinasan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 27 SKPD kedinasan. Variabel dependen penelitian ini yaitu kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi yang bisa menghasilkan suatu informasi keuangan yang mudah dipahami oleh pemakai serta bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan

di masa yang akan datang (Tyas et al., 2020). Variabel independent dalam penelitian ini yaitu SAP, SAKD, Kompetensi SDM, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengadopsi metode kuesioner. Kuesioner penelitian dibagikan untuk responden seperti terhadap pegawai di setiap SKPD agar dapat melakukan koordinasi untuk menyebarkan dan mengumpulkan kuesioner di SKPD. Kuesioner disusun dengan skala Likert yang memiliki lima alternatif jawaban. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda mencakup uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas)(Sujatmiko dkk, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil hasil penelitian diketahui bahwa data penelitian telah memehuni asumsi prasyarat data meliputi pengujian validitas dan reliabilitas dan telah memenuhi pengujian asumsi klasik meliputi pengujian normalitas, multikolinearitas dan heterokedastisitas. Sehingga data penelitian dapat dilanjutkan ketahap pengujian hipotesis. Berikut ringkasan tabel hasil pengujian Hipotesis penelitian ini.

Tabel 1. Hasil Uji T

Model	t	Sig.
(Constant)	-0.264	0.793
Standar Akuntansi Pemerintah	3.041	0.004
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0.490	0.627
Kompetensi Sumber Daya Manusia	2.474	0.017
Pemanfaatan Teknologi Informasi	3.502	0.001

Sumber : Data Diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa **Pertama**, pada variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X1) memiliki nilai r hitung sebesar 3.041 atau lebih besar dari r tabel yaitu 2.018 dan memiliki nilai signifikan sebesar 0.004 lebih kecil dari 0.05. yang berarti **H1** menyatakan Standar Akuntansi Pemerintah secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan diterima. **Kedua**, variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) memiliki r hitung sebesar 0.490 atau lebih kecil dari r tabel yaitu 2.018 dan memiliki nilai signifikan sebesar 0.627 lebih besar dari 0.05. yang berarti **H2** menyatakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan ditolak. **Ketiga**, variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) memiliki nilai r hitung sebesar 2.474 atau lebih besar dari r tabel yaitu 2.018 dan memiliki nilai signifikan sebesar 0.017 lebih kecil dari 0.05. yang berarti **H3** menyatakan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan diterima. **Keempat**, variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4) memiliki nilai r hitung sebesar 3.502 atau lebih besar dari r tabel yaitu 2.018 dan memiliki nilai signifikan sebesar 0.001 lebih kecil dari 0.05. Oleh karena itu **H4** yang menyatakan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan diterima.

## **Pembahasan**

### **Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Banggai Laut. Hal ini dapat berarti standar akuntansi pemerintah menjadi faktor penting untuk memandu penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Secara teoritis, pengaruh positif penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan melalui *Teori Institusional*. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi sektor publik cenderung menyesuaikan kebijakan, prosedur, dan praktik operasionalnya dengan aturan serta norma yang berlaku untuk memperoleh legitimasi dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 2014). Dalam konteks pemerintahan daerah, SAP merupakan instrumen regulatif yang mengarahkan proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan secara seragam. Implementasi SAP yang konsisten akan mendorong terciptanya laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami sebagaimana karakteristik kualitatif laporan keuangan sektor publik (KSAP, 2021; Mahmudi, 2019).

Selain itu, hubungan antara penerapan SAP dan kualitas laporan keuangan juga dapat dijelaskan melalui Teori Agensi. Dalam teori ini, pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang diberi mandat oleh masyarakat dan DPRD sebagai principal untuk mengelola sumber daya publik secara akuntabel (Jensen & Meckling, 1976). Penerapan SAP berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang dapat mengurangi asimetri informasi antara agen dan principal melalui penyajian informasi keuangan yang transparan dan terstandarisasi. Dengan adanya standar yang jelas, pemerintah daerah terdorong untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipercaya sehingga meningkatkan kualitas informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan publik (Mardiasmo, 2021; Halim & Kusufi, 2018).

Temuan ini selaras terhadap Putriasri dan Abdullah (2017) dimana mengungkapkan jika standar akuntansi pemerintah memberi pengaruh pada kualitas laporan keuangan. SAP adalah pedoman dalam menyajikan laporan keuangan dimana terdapat kewajiban bagi pemerintah daerah dalam melakukan penyajian laporan keuangan yang merupakan wujud tanggung jawab dalam mengelola keuangan. Hasil temuan juga sejalan terhadap Wayan dan Gusti (2017) dimana mengungkapkan jika SAP pemerintah memiliki hubungan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Implementasi SAP yang efektif mempermudah pemerintah untuk menyusun laporan keuangan yang mampu menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas lebih baik.

Penelitian dari Yanti et al (2020) menemukan jika implementasi standar akuntansi pemerintah berdampak positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan Faturey et al (2021) yang menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berdampak positif dan signifikan. Penerapan SAP memiliki efektivitas yang berhubungan terhadap teori keagenan. Dalam teori tersebut dinyatakan jika pemerintahan daerah yang merupakan agen wajib mencukupi kebutuhan masyarakat yang diposisikan sebagai principal dimana dimiliki oleh DPR untuk Menyusun laporan keuangan secara berkualitas sehingga mempermudah principal terkait pengambilan keputusan.

### **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.**

Berdasarkan hasil penelitian, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut. Hasil tersebut mengandung arti bahwa sistem dan prosedur yang baik belum tentu mampu menghasilkan informasi yang berkualitas. Secara teoritis, tidak signifikannya pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan melalui perspektif Teori Agensi. Teori agensi menjelaskan bahwa keberadaan sistem dan prosedur yang baik belum tentu mampu menghasilkan informasi yang berkualitas apabila tidak didukung oleh perilaku agen yang kompeten dalam mengimplementasikannya (Difinubun, Y., dan Sismar, 2025). Dalam konteks pemerintah daerah, SAKD hanya berfungsi sebagai instrumen atau mekanisme pencatatan dan pelaporan keuangan. Kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem tersebut, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pengendalian internal, serta komitmen organisasi dalam menerapkan sistem secara konsisten (Mardiasmo, 2021; Halim & Kusufi, 2018). Oleh karena itu, meskipun Pemerintah Kabupaten Banggai Laut telah memiliki dan menerapkan SAKD, sistem tersebut belum tentu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan apabila implementasinya belum optimal atau belum didukung oleh faktor-faktor pendukung lainnya.

Selain itu, Teori Institusional menjelaskan bahwa organisasi publik sering kali mengadopsi suatu sistem sebagai bentuk pemenuhan tuntutan regulasi dan legitimasi eksternal, tanpa diikuti dengan perubahan substantif dalam praktik operasional sehari-hari (DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 2014). Dalam kondisi demikian, penerapan SAKD dapat bersifat administratif atau formalitas semata sehingga belum mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan secara nyata. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa keberadaan sistem akuntansi keuangan daerah belum menjadi faktor utama yang menentukan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, melainkan masih terdapat faktor lain yang lebih dominan, seperti kompetensi aparatur, penerapan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini searah dengan temuan Emilda Ihsanti (2014) dan (Mustika & Fadilah, 2020) yaitu sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini juga didukung oleh Pegi Aprisya, Anik Yuliati (2021) yang menyebutkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam Menyusun laporan keuangan dibutuhkan pemahaman terkait sistem akuntansi keuangan daerah sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan dengan karakteristik kualitatif yang sesuai dan tidak terdapat kandungan saji material. Ketika sistem akuntansi keuangan daerah semakin tinggi maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik juga. Apabila pelaksanaan SAKD disesuaikan pada aturan yang ditetapkan maka bisa diperoleh hasil laporan keuangan secara berkualitas.

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan hasil penelitian, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut. Hasil tersebut berarti sumberdaya memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara teoritis, pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan melalui *Human Capital Theory* yang menyatakan bahwa pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki individu merupakan aset penting yang mampu meningkatkan kinerja organisasi (Becker, 1964). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pegawai yang memiliki kompetensi tinggi akan lebih memahami prosedur akuntansi, regulasi pengelolaan keuangan daerah, serta Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Kompetensi tersebut memungkinkan aparatur untuk melakukan pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, hingga penyajian laporan keuangan secara tepat dan akurat sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh pengguna informasi (Mahmudi, 2019; Bastian, 2014).

Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui *Teori Agensi*. Dalam hubungan keagenan, pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang bertanggung jawab mengelola sumber daya publik dan menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat serta DPRD sebagai principal (Jensen & Meckling, 1976). Kompetensi sumber daya manusia yang memadai memungkinkan aparatur pemerintah menjalankan tanggung jawab tersebut secara profesional dan akuntabel sehingga dapat mengurangi asimetri informasi antara agen dan principal. Semakin tinggi kompetensi aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, maka semakin baik kualitas informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan, yang pada akhirnya mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2021; Halim & Kusufi, 2018).

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sasmita et al (2020) bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini juga di dukung Launtu (2021) berdasarkan hipotesis yang diajukannya dimana membuktikan jika kualitas SDM mampu mempengaruhi secara positif juga signifikan pada kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa SDM berkualitas akan berkemampuan dalam merencanakan dan mengorganisasikan. SDM ini juga mempunyai pengetahuan dan kemampuan umum sebagai SDM, bersemangat kerja tinggi, dan mempunyai pemahaman terhadap bidang kerja masing-masing secara profesional.

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Banggai Laut. Hasil ini berarti teknologi informasi dalam menjadi faktor penentu kualitas laporan keuangan pemerintah. Secara teoritis, pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan melalui *Technology-to-Performance Chain (TPC) Theory* yang menyatakan bahwa teknologi informasi akan meningkatkan kinerja individu maupun organisasi apabila teknologi tersebut dimanfaatkan secara efektif dan sesuai

dengan kebutuhan pekerjaan (Goodhue & Thompson, 1995).

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan proses pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan pelaporan data keuangan dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah dapat mengurangi kesalahan manusia (*human error*), meningkatkan efisiensi proses kerja, serta menghasilkan informasi keuangan yang lebih tepat waktu dan andal. Dengan demikian, semakin optimal pemanfaatan teknologi informasi, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan karena informasi yang disajikan menjadi lebih relevan, akurat, dan dapat dipercaya (Romney & Steinbart, 2021; Hall, 2018).

Selain itu, temuan penelitian ini juga sejalan dengan Teori Agensi yang menjelaskan bahwa teknologi informasi dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat serta DPRD sebagai principal (Jensen & Meckling, 1976). Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan penyajian informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Dengan dukungan sistem informasi yang memadai, pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta mempercepat penyampaian laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, semakin baik pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah, semakin besar pula peluang untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan informasi bagi pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2021; Halim & Kusufi, 2018).

Hasil temuan ini didukung oleh Binawati & Nindyaningsih (2022); Purnama (2020) dan Ternalemta et al (2021) yang menyatakan bahwa “pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ketika teknologi informasi dimanfaatkan dengan baik maka akan memberi beragam manfaat seperti dapat membuat pemrosesan data lebih cepat, menekan kesalahan, meminimalisir biaya dalam memproses data, dan memudahkan upaya Menyusun laporan keuangan dengan mengutamakan kecepatan dan ketepatan. Hal ini bisa menstimulus kinerja pemerintah daerah sehingga kualitas laporannya lebih berkualitas. Untuk itu, semakin baik pemanfaatan teknologi informasi di daerah tertentu, akan mendukung laporan keuangan memiliki kualitas yang lebih baik juga.

Menurut teori, hasil temuan ini sesuai terhadap teori keagenan (*Agency Theory*) (Difinubun, Y., dan Sismar, 2025). Berdasarkan teori agensi yang pihak pemegang amanah (*agent*) wajib mengadopsi teknologi informasi yang menunjang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dimana nantinya tersampaikan terhadap *principal*. Hasil penelitian selaras terhadap penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dimana menyatakan jika “sebagai tindak lanjut penyelenggaraan proses pembangunan sesuai pada prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam melakukan pemanfaatan dan pengembangan kemajuan teknologi informasi dalam rangka mendukung kemampuan pengelolaan keuangan juga penyaluran informasi terhadap layanan publik”

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan

1. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut.
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut.
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Banggai Laut.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan penelitian yang telah dikemukakan adapun saran penelitian ini yaitu diharapkan pemerintah dapat menerapkan kebijakan praktis dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan seperti memperkuat SAP, meningkatkan kompetensi SDM dengan pelatihan, dan mengadopsi berbagai teknologi informasi yang mampu menunjang kinerja pengelolaan keuangan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti mengungkapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi dalam penelitian ini terutama kepada pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut. Peneliti juga berterimakasih kepada pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Animah, A., Suryantara, A. B., & Astuti, W. (2020). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 5(1), 99–109.
- Ayem, S., & Amahala, R. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Informasi Akuntansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 12(01), 90–102. <http://m.rri.co.id/yogyakarta/politik/1031802/diy-seggers-tindaklanjutan-catatan>
- Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. University of Chicago Press.
- Bastian, I. (2014). *Sistem akuntansi sektor publik* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Binawati, E., & Nindyaningsih, C. T. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Optimal*, 19(1), 19–39.
- Damayanti, A. Y., Iswanaji, C., & Arifah, S. (2024). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi, Kompetensi SDM, dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada OPD Kabupaten Kebumen. *Journal of Creative Student Research*, 2(3), 211–224. <https://doi.org/10.55606/jcsr-politama.v2i3.3887>

- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Difinubun, Y., & Sismar, A. (2025). Corporate Social Responsibility as a Moderator of Good Corporate Governance with Company Performance. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 35-51.
- Evicahyani, S. I., & Setiawina, N. D. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(3), 403–428.
- Faturey, S., Ahuluheluw, N., & Basuki, F. H. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)*, 368–379.
- Goodhue, D. L., & Thompson, R. L. (1995). Task-technology fit and individual performance. *MIS Quarterly*, 19(2), 213–236.
- Hall, J. A. (2018). *Accounting information systems* (10th ed.). Cengage Learning.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah* (5th ed.). Salemba Empat.
- Hida, R., Utami, S., & Berliani, K. (2024). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung Tahun 2022). *Jurnal Maneksi*, 13(2), 265–273.
- Ghozali, I. (2017). *Ekonometrika Teori, Konsep, Aplikasi dengan IBM SPSS 24*. Badan Penerbit-Undip.
- Inapty, M. A. F. B. A., & Martiningsih, R. R. S. P. (2016). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating (Studi empiris pada SKPD di Pemprov NTB). *Akuntabilitas*, 9(1).
- Iqbal, M., Sofwan, S. V., & Mariam, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Akurat| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 13(1), 1–15.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). (2021). *Kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual*. KSAP.
- Launtu, A. (2021). Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan kualitas sumberdaya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 18(1), 14–27.
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (4th ed.). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy. *Nominal, Barometer Riset*

- Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2).  
<https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>
- Purnama, H. (2020). Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, standar akuntansi keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan wajib pajak badan. *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(2).
- Risnanto, H., Widiyanti, H., & Amaliyah, F. (2023). The Influence of The Application of Government Accounting Standards, Application Of Region's Financial Accounting System and Human Resource Competencies to The Quality of Financial Statements. *Monex-Journal of Accounting Research*, 12(1), 140–151.
- Rompas, F., & Kindangen, W. (2022). Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2021). *Accounting information systems* (15th ed.). Pearson.
- Sasmita, D. A., Nasrizal, N., & Rasuli, M. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 118–129.
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities* (4th ed.). Sage Publications.
- Sujatmiko, D. B., Difiubun, Y., & Munzir, M. (2024). Pengungkapan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Indonesia diprosikan dengan Profitabilitas. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 4(2), 69-79.
- Ternalemata, T., Kalangi, L., & Tinangon, J. J. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 12(1), 38–50.
- Utama, I. K. I. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintah Kota Denpasar. *HITA Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 492–513.
- Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Yanti, N. S., Made, A., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4455>